

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras pada tahun 1984, namun pada tahun 1990-an mulai import beras lagi, antara lain karena adanya alih fungsi beberapa lahan sawah irigasi menjadi lahan industri dan pemukiman, serta menurunnya fungsi beberapa prasarana irigasi.

Menurut Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2010 – 2014 akan dilakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi baru seluas 500.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada seluas 1.340.944 ha sebagai upaya untuk menunjang swasembaga beras. Salah satu upaya untuk mewujudkan rencana strategis tersebut maka pada tahun 2006 sampai 2007 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsultan *Nippon Koei and Associates* melakukan studi kelayakan proyek *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia II* (DISIMP II) yang terletak di 9 propinsi, yang meliputi 14 sub-proyek dan 30 paket pekerjaan, dan salah satu sub-proyek yang masuk dalam DISIMP II adalah Daerah Irigasi Bajo yang terletak di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Dana untuk proyek DISIMP II berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang untuk membiayai pekerjaan jaringan utama sedangkan untuk pekerjaan jaringan sekunder menggunakan dana dari Pemerintah Indonesia berupa APBN rupiah murni.

Daerah irigasi Bajo direncanakan dengan luas 5.828 ha, terdiri dari areal irigasi semi teknis seluas 3.194 ha dan areal tadah hujan seluas 2.634 ha yang terletak di lima kecamatan yaitu Kecamatan Belopa, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Bajo dan Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Peta Daerah Irigasi Bajo dan Skema Jaringan Irigasi ditunjukkan pada Lampiran G.1 dan Lampiran G.2.

Sub-proyek Bajo berupa pembangunan bendung dan rehabilitasi jaringan irigasi Bajo yang pada awal proyek terdiri dari 2 paket pekerjaan, yaitu: (1) P-18 Pembangunan Bendung Bajo dan Rehabilitasi Saluran Induk Bajo dan (2) P-19: Rehabilitasi Saluran Sekunder seluas 3194 ha, dengan adanya kelebihan dana pinjaman maka dilanjutkan dengan paket ke (3) yaitu P-18A: Rehabilitasi Saluran Sekunder seluas 2.634 ha.

Pekerjaan Paket P-18 dan P-19 dimulai pada tahun 2010, dan selesai tahun 2012, sedangkan paket P-18A dimulai tahun 2013 dan direncanakan selesai pada tahun 2014. Disamping itu masih ada beberapa paket pekerjaan pembangunan jaringan tersier sebanyak 5 paket, yaitu P-19A dan P-19B yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan P-19C, P-19D dan P-19E yang akan dikerjakan tahun 2014.

Bendung Bajo, direncanakan terletak 50 m dihilir bangunan bendung bronjong yang ada yang kondisinya telah rusak parah, namun bangunan pengambilannya masih bisa difungsikan untuk mengalirkan air dari sungai menuju saluran induk Bajo.

Metode *dewatering* yang digunakan pada waktu pelaksanaan konstruksi tubuh bendung Bajo yaitu saluran pengelak dan *cofferdam*, air yang terkurung di dalam *cofferdam* dipompa dengan sistem *open pumping*, dan untuk pekerjaan kantong lumpur yang terletak pada saluran lama menggunakan cara penutupan intake lama sehingga aliran air ke daerah irigasi Bajo tertutup total.

Sesuai hasil sosialisasi yang dilakukan di beberapa kecamatan dan dihadiri oleh petani dan semua pihak terkait, telah disepakati penutupan air saluran irigasi selama satu musim tanam mulai 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2011 kemudian dilanjutkan dengan penutupan air saluran irigasi secara berselang dengan interval satu minggu untuk saluran sekunder.

Penutupan saluran irigasi selama 6 bulan menyebabkan petani tidak dapat bercocok tanam padi selama satu musim tanam, dan untuk mengurangi kerugian petani maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah menganjurkan agar petani menanam palawija dengan mengandalkan air hujan, walaupun begitu hasil produksi yang diperoleh petani secara keseluruhan telah menurun dibandingkan dengan keadaan sebelum dilakukan penutupan air.

Kondisi ini menyebabkan beberapa petani mengeluh dengan adanya penutupan air secara total selama satu musim tanam dan mempertanyakan apakah tidak ada metode lain yang tidak terlalu merugikan petani selama pelaksanaan konstruksi, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya penurunan pendapatan petani selama pelaksanaan

konstruksi dan mencari alternatif penggunaan metode *dewatering* yang tidak merugikan petani selama pelaksanaan konstruksi.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Berapa besarnya kerugian petani selama pelaksanaan konstruksi akibat penggunaan metode *dewatering* berupa penutupan air di saluran irigasi.
- 2) Apakah ada metode *dewatering* lainnya yang layak digunakan untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi dan tidak menimbulkan penurunan produksi pertanian selama pelaksanaan konstruksi.

Agar dalam pembahasannya tidak keluar dari tujuan yang ditetapkan maka penelitian yang dilakukan dibatasi sebagai berikut:

- 1) Areal irigasi semi teknis seluas 3.194 ha yang terkena dampak penggunaan metode *dewatering* selama pelaksanaan konstruksi.
- 2) Penggunaan metode *dewatering* pada pembangunan kantong lumpur dan bangunan pengambilan Bendung Bajo serta pada rehabilitasi Saluran Induk Bajo dan Saluran Induk Belopa.
- 3) Analisis kelayakan penggunaan metode *dewatering* dibatasi pada aspek teknis dan aspek ekonomi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kelayakan penggunaan metode *dewatering* pada pembangunan bendung dan rehabilitasi jaringan irigasi Bajo di Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan yang lebih luas mengenai kelayakan penggunaan metode *dewatering* pada pembangunan bendung dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta menambah daftar pustaka yang sudah ada di lingkungan akademik, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat bagi daerah-daerah irigasi yang akan dilakukan pembangunan bendung dan atau rehabilitasi jaringan irigasi di masa yang akan datang, sehingga kerugian petani akibat penggunaan metode *dewatering* selama pelaksanaan konstruksi dapat dihindari atau diminimalkan.